

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Politik Aliran

1. Sejarah Politik di Indonesia

Politik memiliki akar kata yang bersumber dari Bahasa Yunani, yaitu *Polis*. *Polis* sendiri memiliki makna negara-kota.¹ Aristoteles memaknai politik sebagai aktivitas mulia dan mencerahkan, sehingga, politik yang berada dalam karakteristik kegiatan publik menjadi sesuatu yang baik. Sementara John Stuart Mill berpendapat bahwasanya politik merupakan kegiatan public yang bermanfaat untuk memberikan edukasi yang dapat mempromosikan mengenai nilai-nilai moral, personal dan intelektual untuk pengembangan dari individu itu sendiri.²

Suatu istilah general yang menerangkan suatu kerangka besar tentang hakikat dan proses politik yang terjadi pada berbagai entitas di berbagai masa disebut dengan sistem politik.³ Pengertian lain dari proses politik adalah serangkaian proses-proses dan interaksi, atau sebagai subsistem dari sistem sosial yang berinteraksi dengan non-politis, seperti sistem ekonomi.⁴

Miriam Budiardjo berpendapat, seperti yang dikutip oleh Rusfiana dan Nurdin, bahwasanya politik memiliki konsep pokok yaitu; negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan pembagian atau lokasi.⁵

¹ Yudi Rusfiana dan Ismail Nurdin, *Dinamika Politik Kontemporer; Internasioanal dan Lokal Dengan Hambatan dan Tantangan Dalam Pencapaiannya* (Bandung: Alvabeta, 2017), h. 2

² Yudi Rusfiana dan Ismail Nurdin, *Dinamika Politik Kontemporer*, h. 17-18.

³ Yudi Rusfiana dan Ismail Nurdin, *Dinamika Politik Kontemporer*, h. 51.

⁴ Yudi Rusfiana dan Ismail Nurdin, *Dinamika Politik Kontemporer*, h. 53.

⁵ Yudi Rusfiana dan Ismail Nurdin, *Dinamika Politik Kontemporer*, h. 3.

Republik Indonesia merupakan suatu entitas politik dengan platform Negara-Bangsa atau lebih dikenal dengan Negara Kesatuan dan Republik yang memerdekakan dirinya dari kekaisaran Jepang pada tanggal 17 Agustus 1945.⁶

Jika membahas mengenai sejarah atau perkembangan politik dari suatu negara, tentu saja secara tidak langsung membahas tentang sistem politiknya. Di Indonesia sendiri telah mengalami dinamika dalam dunia perpolitikan mulai dari era perjuangan kemerdekaan hingga saat ini. Terdapat istilah-istilah yang digunakan oleh para pakar politik dalam menamai dafe-fase perjalanan sistem politik Indonesia. Untuk mencegah kerancuan maka penulis akan memakai istilah-istilah yang digunakan oleh Yadi Rusfiaana dan Ismail Nurdin.

a. Era Perjuangan Kemerdekaan (1945-1949)

Berdasarkan pada UUD tahun 1945 dinyatakan bahwasanya Indonesia adalah “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik” dan dilanjutkan pada Ayat 2 yang menyatakan bahwasanya “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusjawaratan Rakjat”. kedua keterangan tersebut memberikan keteanagan bahwasanya identitas negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan ciri karakteristik khasnya menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat.⁷

Sistem politik Indonesia pada awal kenmerdekaan berorientasi pada upaya membentuk dasar konstitusi dan mendirikan badan-badan legal formal sebagai struktur politik dalam menjadlankan politik. Dalam hal ini,

⁶ Yudi Rusfiana dan Ismail Nurdin, *Dinamika Politik Kontemporer*, h. 49.

⁷ Yudi Rusfiana dan Ismail Nurdin, *Dinamika Politik Kontemporer*, h. 56.

UUD menjadi landasan konstitusi Indonesia dan konsep Trias Politica baru dibangun secara bertahap.⁸

Pada tanggal 16 Oktober 1945, dalam sidang paripurna KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) yang diketuai oleh Mr. Kasman Singodimedjo dan dihadiri oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta, menetapkan bahwa selama MPR dan DPR belum dapat dibentuk, KNIP memiliki wewenang legislatif dan turut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara. Untuk menjalankan tugas sehari-hari, dibentuklah Badan Pekerja yang bertanggung jawab kepada KNIP. Melalui Maklumat No. X, KNIP berubah menjadi semacam parlemen sementara. Tahap kedua, para menteri menjadi bertanggung jawab kepada KNIP yang telah menjadi parlemen sementara, mengubah sistem pemerintah presidensial menjadi sistem pemerintah parlementer. Perubahan ini dikukuhkan dalam UUD RIS 1949 dan UUD Sementara 1950, dan berlaku hingga bulan Juli 1959 saat Indonesia kembali ke UUD 1945.⁹

b. Era Demokrasi Terpimpin (1950-1959)

Era ini juga disebut sebagai Masa Orde Lama dimana pada era ini sistem politik Indonesia sedang menuju kearah-arah perilaku atau kegiatan politik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, khususnya yang berkaitan dengan tugas konstitusi.¹⁰

Sejak 17 Agustus 1950, negara Indonesia diperintah dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950

⁸ Yudi Rusfiana dan Ismail Nurdin, *Dinamika Politik Kontemporer*, h. 62-63.

⁹ Yudi Rusfiana dan Ismail Nurdin, *Dinamika Politik Kontemporer*, h. 425-426.

¹⁰ Yudi Rusfiana dan Ismail Nurdin, *Dinamika Politik Kontemporer*, h. 67.

yang menganut sistem parlementer. UUDS 1950 adalah konstitusi yang berlaku sampai dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.¹¹

c. Era Demokrasi Terpimpin (1959-1966)

Pada era ini, bentuk negara Indonesia dan pemerintahannya masih bertahan pada sistem kesatuan serta republik namun perubahan terjadi pada sistem pemerintahan yang dikembalikan ke sistem presidensial.¹²

Pada era ini dibentuk MPRS melalui Ketetapan Presiden No. 2 Tahun 1959, dengan lembaga DPR dan utusan daerah serta golongan sebagai pelengkap. Pada era ini juga ditetapkan pendirian DPRS melalui ketetapan presiden No. 3 Tahun 1959.¹³ Pada masa ini juga terjadi peristiwa penting seperti G30S, Operasi Trikora dan Konfrontasi Indonesia-Malaysia.¹⁴

d. Era Orde Baru (1966-1998)

Masa Orde Baru dimulai dengan penunjukan Soeharto sebagai presiden melalui Supersemar. Pada periode Orde Baru ini, pemerintah berkomitmen untuk menerapkan UUD 1945 dan Pancasila secara konsisten dan murni. Sistem yang ditetapkan adalah Demokrasi Pancasila dan sistem pemerintahan presidensial. Selama masa ini, kekuasaan dan kepemimpinan presiden memiliki peran yang sangat dominan dalam mengendalikan dan

¹¹ Sahaya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 31.

¹² Yudi Rusfiana dan Ismail Nurdin, *Dinamika Politik Kontemporer*, h. 68.

¹³ Yudi Rusfiana dan Ismail Nurdin, *Dinamika Politik Kontemporer*, h. 68-69.

¹⁴ Yudi Rusfiana dan Ismail Nurdin, *Dinamika Politik Kontemporer*, h. 70.

mengatur seluruh proses politik, sehingga terjadi sentralisasi kekuasaan pada presiden.¹⁵

Pada masa ini pemerintah menyederkanakan sistem kepartaian menjadi tiga partai besar yaitu Golkar, PDI, dan PPP. Namun dominasi politik pada masa Orde Baru dipegang oleh Golkar dari golongan partai dan ABRI dari golongan militer. Tidak mengherankan karena Golkar, disamping menjadi parpol, juga menjadi kepanjaangan tangan pemerintah serta mendapat dukungan militer.¹⁶

Robert Hefner berkata, sebagaimana dikutip Sahaya Anggara, bahwa ada yang mengatakan kemenangan Orde Baru merupakan kemenangan “orang Jawa” karena para elite Orde Baru dibesarkan dalam lingkungan Hindu-Jawa sehingga menjadikannya lebih kuat dari yang lain. Permusuhan elit penguasa Islam mendorong pemerintah untuk melarang kembali Masyumi pada tahun 1966, serta membatasi peran partai Islam dan menggabungkannya ke dalam PPP pada tahun 1973. Elit Orde Baru cenderung berkoalisi dengan orang-orang Cina Katolik, bekas anggota PSI, dan sejumlah perwira militer yang anti-Islam, dengan Ali Murtopo, pendiri CSIS, berperan penting dalam merancang kebijakan Orde Baru. Pada Sidang Umum MPR 1973, usulan untuk mengakui aliran kepercayaan sebagai agama menyebabkan kontroversi di kalangan umat Islam.¹⁷

Kendati menjadi rezim terlama yang berkuasa, rezim Orde Baru nyatanya tidak mampu membawa aspirasi rakyat secara sepenuhnya. Sistem

¹⁵ Sahaya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, h. 33.

¹⁶ Yudi Rusfiana dan Ismail Nurdin, *Dinamika Politik Kontemporer*, h. 74.

¹⁷ Sahaya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, h. 42.

politik rezim ini juga tidak bisa membawa keseimbangan dan stabilitas negara. Kegagalan itu akhirnya membuat gejolak politik dan pergerakan mahasiswa diberbagai daerah dengan tujuan menggulingkan rezim yang berkuasa. Gelombang politik inilah yang menggulingkan Soeharto sekaligus mengakhiri rezim Orde Baru.¹⁸

e. Era Reformasi (1999-Sekarang)

Era ini dimulaisejak kejatuhan Soeharto pada 21 Mei 1998, lebih tepatnya dimulai pada tahun 1999 ketika presiden saat itu dijabat oleh B.J. Habibie. Era ni merupakan fase terbesar dalam sejarah sistem politik Indonesia. Di era Reformasi terdapat perubahan dengan melakukan amandemen terhadap dasar konstitusi yakni UUD 1945 sebanyak empat kali. Tujuan utama dari perubahan tersebut adalah untuk mnyempurnakan aturan dasar pada pokok-pokok ketatanegaraan, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan prinsip demokrasi, penjunjungan asas negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa.¹⁹

Perubahan yang didambakan tentu adalah mendirikan suatu sistem dimana prtai politik tidak mendominasi ruang politi secara berlebihan, juga memberikan peluang kepada eksekutif agar tidak terlalu kuat. Sebaliknya, baik itu kekuatan eksekutif dan legislatif menjadi setara sebgaimana diamanatkan dalam UUD 1945.²⁰

¹⁸ Yudi Rusfiana dan Ismail Nurdin, *Dinamika Politik Kontemporer*, h. 75-76.

¹⁹ Yudi Rusfiana dan Ismail Nurdin, *Dinamika Politik Kontemporer*, h. 77.

²⁰ Miriam Budihardjo, *Dasar-dasar Ilmu politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 449.

Namun, pada perhelatan pemilu pada tanggal 7 Juni 1999 memunculkan pola yang sama sebagaimana pemilu tahun 1955, yaitu hanya ada sejumlah partai kecil yang mendominasi pemilu. Terdapat 5 partai yang mendapatkan suara terbanyak. Secara runtut yaitu; PDIP, Golkar, PKB, PPP, PAN, dan PBB.²¹

Sebagaimana pemilu 1999, pemilu 2004 juga mendapati realita yang serupa yaitu didominasi oleh sebagian partai besar. Secara runtut yaitu; Golkar, PDIP, PKB, PPP, Demokrat, PKS, dan PAN.²²

2. Partai politik

a. Konsep Pengertian Partai Politik

Partai politik secara umum dapat diartikan sebagai suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik untuk melaksanakan program politiknya.²³

Sedangkan Neumann berpendapat bahwasanyavpartai politik adalah perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi.²⁴

Partai politik juga bisa diartikan sebagai organisasi yang terdiri dari sekelompok individu yang memiliki tujuan dan cita-cita yang sama, yaitu merebut kekuasaan melalui pemilihan umum. Dengan visi dan misi yang sama, partai politik menjadi penghubung antara aspirasi rakyat dan

²¹ Miriam Budihardjo, *Dasar-dasar Ilmu politik*, h. 451.

²² Miriam Budihardjo, *Dasar-dasar Ilmu politik*, h. 454.

²³ Miriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, h. 404.

²⁴ Miriam Budihardjo, *Dasar-dasar Ilmu politik*, h. 404.

pemerintah. Partai politik tidak hanya menjadi lembaga organisasi, tetapi juga memiliki peranan penting dalam menentukan masa depan demokrasi.²⁵

Mengutip dari Lapalombara dan Weiner, Firmanzah menambahkan bahwa, partai politik setidaknya memiliki empat unsur utama, yakni organisasi yang terlembaga dan berkelanjutan, memiliki struktur hierarkis dari tingkat pusat hingga ranting, mewakili kepentingan rakyat melalui penggunaan kekuasaan, serta berupaya meningkatkan elektabilitas dengan meraih suara.²⁶

Partai politik awalnya muncul di negara-negara Eropa Barat sebagai hasil dari semakin luasnya pemikiran bahwa rakyat harus diakui dan dilibatkan dalam proses politik.²⁷ Partai politik menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintahan. Pada awal perkembangannya, pada akhir abad ke-18 di negara-negara Barat seperti Inggris dan Prancis, aktivitas politik terpusat pada kelompok-kelompok politik di parlemen. Awalnya, kegiatan ini bersifat elitistis dan aristokratis, yang memperjuangkan kepentingan kaum bangsawan melawan tuntutan raja.²⁸

Seiring dengan diperluasnya hak pilih, kegiatan politik juga berkembang di luar parlemen dengan munculnya panitia pemilihan yang mengatur pengumpulan suara para pendukung menjelang pemilihan umum. Kelompok-kelompok politik di parlemen mulai mengembangkan organisasi

²⁵ Richard S. Katz dan William Crotty, *Handbook Partai Politik*, (Bandung: Nusa Media, 2014), h. 5-6.

²⁶ Firmanzah, *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm. 68-69.

²⁷ Miriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 397

²⁸ Miriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, h. 398.

massa karena mereka menyadari pentingnya mendapatkan dukungan dari berbagai golongan masyarakat. Pada akhir abad ke-19, lahir lah partai politik yang menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah.²⁹

Partai politik pada praktiknya lebih fokus pada memenangkan pemilihan umum, sementara kurang aktif di masa di antara dua pemilihan umum. Partai-partai semacam ini biasanya tidak memiliki disiplin partai yang ketat dan tidak terlalu memprioritaskan pengumpulan iuran. Mereka dikenal sebagai *patronage party* (partai lindungan) yang berfungsi sebagai perantara dan mementingkan kekuatan berdasarkan jumlah anggota. Oleh karena itu, mereka sering disebut sebagai partai massa. Partai semacam ini terdiri dari pendukung dari berbagai aliran politik dalam masyarakat yang bersatu di bawah benderanya untuk memperjuangkan program tertentu. Program ini cenderung luas dan kabur karena harus mewakili berbagai kepentingan yang berbeda. Contohnya adalah Partai Republik dan Partai Demokrat di Amerika Serikat.³⁰

Pada perkembangan selanjutnya di dunia Barat, muncul partai politik yang berdiri di luar parlemen. Partai-partai ini didasarkan pada asas atau ideologi tertentu seperti Sosialisme, Fasisme, Komunisme, Kristen Demokrat, dan sebagainya. Disiplin partai dalam jenis partai ini lebih ketat. Pada masa sebelum Perang Dunia I, terjadi perpecahan partai berdasarkan ideologi dan ekonomi, yaitu partai "Kiri" dan partai "Kanan". Konsep "Kiri" versus "Kanan" ini telah diterima oleh masyarakat dan tidak dapat diabaikan

²⁹ Miriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, h. 398.

³⁰ Miriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, h. 398.

dalam analisis politik. Pembagian "Kiri" dan "Kanan" berasal dari Revolusi Prancis, di mana pendukung struktur tradisional duduk di sebelah kanan panggung ketua, sedangkan mereka yang mendukung perubahan dan reformasi duduk di sebelah kiri. Konsep ini dapat digambarkan sebagai suatu spektrum linier, dengan "ekstrem Kiri" di satu ujung (intervensi negara total dalam kehidupan sosial dan ekonomi) dan "ekstrem Kanan" di ujung lain (pasar bebas total).³¹

Seiring dengan berakhirnya Perang Dunia II, terjadi kecenderungan di partai-partai politik di dunia Barat untuk menghilangkan perbedaan tradisional antara jenis-jenis partai, (seperti *patronage* vs ideologi/*weltanschauung*), massa vs kader, dan kiri vs kanan. Hal tersebut disebabkan adanya upaya dari partai kecil untuk menjadi partai besar dan meraih kemenangan dalam pemilihan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka mengambil pendekatan yang lebih inklusif dan fleksibel dengan merangkul pemilih tengah dan mengendurkan sikap doktriner, kaku, dan eksklusif.³²

Dalam prosesnya, partai politik juga menjadi sebuah wadah terhadap gagasan keikutsertaan rakyat dalam proses politik. Ini menjadi dasar bagi partai politik terbentuk dan berkembang bahkan menjadi lambang sebuah negara penganut demokrasi hingga komunis. Di negara dengan sistem totaliter, partai politik digunakan sebagai alat oleh elite untuk memobilisasi masyarakat dalam mencapai tujuan negara. Partai politik dalam sistem

³¹ Miriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, h. 398-400.

³² Miriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, h. 400.

politik komunis dan fasis memiliki basis kader yang militan dengan struktur organisasi yang hirarkis. Dengan demikian, partai politik di negara demokrasi bersifat sebagai pemersatu aspirasi rakyat melalui pemilu, sedangkan dalam sistem totaliter, partai politik menjadi alat negara untuk memobilisasi rakyat dan menundukkan mereka pada keputusan partai.³³

b. Fungsi Partai Politik

Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan untuk mewujudkan program-program berdasarkan ideologi tertentu. Di dalam sistem politik demokrasi, partai politik mencapai dan mempertahankan kekuasaan melalui partisipasi dalam pemilihan umum, sementara dalam sistem politik totaliter, partai tunggal menggunakan paksaan fisik dan psikologis untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.³⁴

Ketika melaksanakan fungsi tersebut, partai politik demokrasi melaksanakan tiga kegiatan utama yaitu; seleksi calon, kampanye, dan fungsi pemerintahan (legislatif dan/atau eksekutif). Setelah memperoleh kekuasaan, partai politik berperan sebagai pembuat keputusan politik. Partai politik minoritas memiliki peran sebagai pengontrol terhadap partai mayoritas. Di sistem politik totaliter, pemilihan umum berfungsi sebagai pengesahan calon tunggal yang telah ditetapkan sebelumnya oleh partai tunggal. Selain itu, partai politik juga menjalankan fungsi lainnya dalam kedua sistem politik tersebut. Kendati demikian, partai politik, baik dalam

³³ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Grasindo, 1992), hlm. 115-116

³⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Grasindo, 1992), h. 117.

sistem politik demokrasi maupun sistem politik totaliter, juga menjalankan sejumlah fungsi lainnya.³⁵

Pertama, Sosialisasi Politik: Merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakat. Sosialisasi politik terjadi sepanjang hidup melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal. Metode penyampaian pesan dalam sosialisasi politik dapat berupa pendidikan politik dan indoktrinasi politik.

Kedua, Rekrutmen Politik: Merupakan seleksi dan pemilihan individu atau kelompok orang untuk memainkan peran dalam sistem politik dan pemerintahan. Rekrutmen politik penting dalam mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam sistem politik.

Ketiga, Partisipasi Politik: Merupakan kegiatan warga negara dalam mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dan pemilihan pemimpin pemerintahan. Partai politik berperan dalam membuka kesempatan dan mendorong partisipasi politik masyarakat.

Keempat, Pemaduan Kepentingan: Partai politik bertugas untuk menampung dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda atau bertentangan dalam masyarakat. Partai politik memperjuangkan berbagai alternatif kebijakan yang mencerminkan kepentingan masyarakat.

Kelima, Komunikasi Politik: Partai politik berfungsi sebagai komunikator politik antara pemerintah dan masyarakat. Mereka

³⁵ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, h. 117-120.

menyampaikan informasi, keputusan pemerintah kepada masyarakat, serta aspirasi dan kepentingan masyarakat kepada pemerintah.

Keenam, Pengendalian Konflik: Partai politik berperan dalam mengendalikan konflik dalam masyarakat melalui dialog, penampung aspirasi, dan membawa masalah kedalam lembaga demokrasi untuk mendapatkan penyelesaian melalui keputusan politik.

Ketujuh, Kontrol Politik: Partai politik melaksanakan kontrol politik dengan menunjukkan kesalahan, kelemahan, dan penyimpangan dalam kebijakan pemerintah. Tujuan kontrol politik adalah untuk memperbaiki kebijakan yang menyimpang dan memastikan kebijakan tersebut sesuai dengan nilai-nilai politik yang dianggap ideal dan baik.

c. Tipologi Partai Politik

Tipologi Partai Politik adalah pengklasifikasian partai politik berdasarkan kriteria tertentu. Terdapat tiga sub-tipologi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:³⁶

1) Asas dan Orientasi

Partai politik yang berdasarkan pada orientasi terbagi menjadi tiga jenis. *Pertama*, Partai Politik Pragmatis. Partai politik pragmatis adalah partai yang tidak terikat pada doktrin atau ideologi tertentu serta program dan kegiatan partainya dapat berubah sesuai dengan waktu, situasi, dan kepemimpinan. *Kedua*, Partai Politik Doktriner. Partai politik doktriner adalah partai politik yang memiliki program dan kegiatan yang

³⁶ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Grasindo, 1992), h. 121-124.

sesuai dengan ideologi yang telah dirumuskan secara kongkrit. Partai politik doktriner juga terorganisasi dengan ketat. *Ketiga*, Partai Politik Kepentingan. Partai politik kepentingan adalah partai yang dibentuk berdasarkan kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, etnis, agama, atau lingkungan hidup. Partai politik kepentingan adalah partai yang ingin langsung berpartisipasi dalam pemerintahan.

2) Komposisi dan Fungsi Anggota:

Jenis kedua dari tipologi ini terbagi menjadi dua. *Pertama*, Partai Massa atau Lindungan (Patronage). Partai massa atau lindungan adalah partai yang mengandalkan kekuatan jumlah anggota untuk memobilisasi massa sebanyak mungkin. Partai ini berusaha menjadi pelindung bagi berbagai kelompok dalam masyarakat. *Kedua*, Partai Kader. Partai kader merupakan partai yang mengandalkan kualitas anggota, keketatan organisasi, dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan utama. Seleksi keanggotaan dalam partai ini sangat ketat dan struktur organisasinya hirarkis.

3) Basis Sosial dan Tujuan

Partai politik yang diklasifikasikan berdasar kepada basis sosial terbagi menjadi empat jenis, yaitu *pertama*, partai politik yang beranggotakan berbagai lapisan sosial, seperti kelas bawah, menengah, dan atas. *Kedua*, partai politik yang beranggotakan mereka yang memiliki kepentingan, seperti buruh, petani, dan pengusaha. *Ketiga*, partai politik yang memiliki anggota kelompok pemeluk agama tertentu.

Keempat, partai politik yang memiliki anggota kelompok atau suku budaya tertentu.³⁷

Sedangkan klasifikasi partai politik berdasarkan tujuan terbagi menjadi tiga. *Pertama*, partai sebagai perwakilan kelompok. Partai ini merupakan bentuk partai politik yang mempersatukan berbagai kelompok masyarakat dalam rangka mendapatkan suara terbanyak dan kursi perlemen. *Kedua*, partai pembinaan bangsa. Partai ini memiliki tujuan untuk menghilangkan kepentingan golongan dengan memperkuat kesatuan nasional. *Ketiga*, partai mobilisasi. Partai ini bertujuan untuk memobilisasi masyarakat agar tercapainya target yang telah ditetapkan oleh partai.³⁸

3. Politik Aliran

Politik aliran adalah kelompok sosio-budaya yang menjelma menjadi sebagai organisasi politik.³⁹ Kemudian manifestasi daripada organisasi politik bisa berbentuk politik aliran, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Serikat Buruh, Gerakan Sosial, dan lain sebagainya. Politik aliran dan partai politik dapat dikatakan bahwasanya keduanya memiliki hubungan yang saling berkaitan. Seperti partai politik yang menjadi representasi dari politik aliran, politik aliran yang menjadi ideologi partai politik, serta politik aliran sebagai wadah partai politik.

³⁷ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, h. 123.

³⁸ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, h. 123.

³⁹ William R. Liddle dalam Salim Alatas, "Politik Aliran Dalam Pemilu 2009 (Studi Atas Political Marketing Partai Keadilan Sejahtera)", *Jurnal Kom dan Realitas Sosial*, Vol. 1, No. 1 (Oktober 2010), hal. 39

Konsep Politik aliran pertama kali diciptakan oleh antropolog Clifford Geertz untuk menggambarkan sosiokultural dan politik desa di daerah Jawa pada awal zaman kemerdekaan. Geertz tinggal di daerah bernama Pare namun Geertz menganonimkannya menjadi Mojokuto.⁴⁰ Geertz melakukan penelitian di Mojokuto selama dua tahun 1952-1954. Selanjutnya istilah politik aliran mulai diperkenalkan di dunia ilmiah pada tahun 1959 *The Javanese Village*, yang diterbitkan dalam sebuah buku, *Local Ethnic and National Loyalties in Village Indonesia*.⁴¹

Pada tahun 1950-an, Clifford Geertz menemukan empat aliran politik besar dalam masyarakat Jawa yaitu: PNI yang mewakili golongan priyayi, PKI yang mewakili golongan abangan, Masyumi yang mewakili golongan santri modernis dan, serta NU yang merupakan santri tradisional.⁴²

Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamlirkan, kehadiran partai-partai politik mendapatkan legalitas melalui Maklumat Pemerintah yang ditandatangani Wakil Presiden Moh. Hatta, tanggal 3 November 1945. Dalam Maklumat itu tertera antara lain: Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik kerana dengan partai-partai politik itulah dapat dipimpin kejalan yang teratur segala aliran yang ada dalam masyarakat. Maklumat Pemerintah itu disambut hangat oleh rakyat dengan membentuk berbagai macam partai, dalam

⁴⁰ Mojo dalam Bahasa Jawa berarti pahit dan Kuto berarti ikota, ketika digabungkan menjadi Kota Pahit. Suatu daerah di Jawa Timur yang memiliki nama kota yang identik dengan kata pahit adalah Pare, Kediri.

⁴¹ Salim Alatas, "Politik Aliran Dalam Pemilu 2009 (Studi Atas Political Marketing Partai Keadilan Sejahtera)", *Jurnal Kom dan Realitas Sosial*, Vol. 1, No. 1 (Oktober 2010), hal. 43

⁴² Muhammad S. Alatas, "Politik Aliran Dalam Pemilu 2009: Studi Atas Perubahan Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu 2009", (Skripsi, Program sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010), h. 3.

kurun waktu 5 tahun (1945-1950) tercatat 27 partai dengan ideologi atau aliran baik secara jelas maupun tidak jelas dari perspektif ideologi kepartaian.⁴³

Pada pemilu 1955 yang berlangsung 29 desember untuk memilih anggota DPR dan 15 Desember 1955 yang diselenggarakan untuk memilih anggota konstituante menghasilkan 5 (lima) besar partai yakni (1) PNI yang beraliran Nasionalis, (2) Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) beraliran Islam “Modernis”, (3) Nahdhatul ulama (NU) beraliran Islam “tradisionalis”, (4) PKI beraliran komunis marxis, dan (5) PSII yang beraliran Islam “normatif”.⁴⁴

4. Biografi Singkat Clifford Geertz

Clifford Geertz, seorang ahli antropologi budaya, lahir di San Francisco, California, pada tanggal 23 Agustus 1926. Setelah bergabung dengan Angkatan Laut Amerika selama Perang Dunia II, Geertz memulai karir akademiknya di Antioch College di Ohio dan lulus dengan gelar sarjana filsafat pada tahun 1950.⁴⁵ Ia kemudian melanjutkan studi antropologi di Harvard University, di mana ia dan istrinya melakukan penelitian di Pulau Jawa selama dua tahun, terutama di wilayah Mojokuto, yang memberikan kontribusi penting dalam pemahaman Geertz tentang masyarakat multiagama di Indonesia.⁴⁶

⁴³ Sigit Pamungkas, “Partai Politik, Teori dan Praktek di Indonesia” dalam Partai Politik dan Sistem Demokrasi di Indonesia, ed. Aiyub Mohsin (Yogyakarta: Jurnal Populis, 2018), h. 778.

⁴⁴ Aiyub Mohsin, “Partai Politik dan Sistem Demokrasi di Indonesia”, *Jurnal Populis*, Vol. 3, No. 6 (Desember 2018), h. 779.

⁴⁵ Daniel L. Pals, *Seven Theories of Religion*; dari Animisme E.B. Taylor, Materialisme Karl Marx hingga Antropologi Budaya C. Geertz, terj. Ali Noer Zaman (Yogyakarta: Qalam, 2001), h. 397.

⁴⁶ Ahmad Sugeng Riady, “Agama dan Kebudayaan Masyarakat Perspektif Clifford Geertz”, *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*, Vol. 2, 1 (Maret 2021), h. 16.

Pada tahun 1956, Geertz meraih gelar doktor dari Harvard dengan penelitian tentang masyarakat multiagama di Indonesia, termasuk penelitian di Bali dan komunitas Muslim di Maroko.⁴⁷ Setelah penelitiannya di Bali selesai, Geertz menjadi staf pengajar di Universitas California di Berkeley, namun hanya bertahan selama dua tahun sebelum pindah ke Universitas Chicago selama satu dekade. Setelah itu, ia menjabat sebagai profesor antropologi di Institut for Advanced Study di Princeton.⁴⁸

Selain karir akademiknya, Geertz juga menjadi profesor tamu di berbagai universitas terkenal, termasuk Universitas Oxford dan Universitas Princeton. Meskipun ia pensiun pada tahun 2000, Geertz tetap aktif dalam berkontribusi melalui tulisan dan ceramah. Clifford Geertz meninggal pada tanggal 31 Oktober 2006 setelah menjalani operasi jantung di Rumah Sakit Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat.⁴⁹

Clifford Geertz merupakan seorang ahli antropologi budaya yang memiliki pandangan unik dalam pendekatannya terhadap kebudayaan. Ia tidak hanya melihat gejala sosial yang tampak di permukaan, tetapi juga berusaha memahami konteks tata nilai para pelakunya. Dalam penelitiannya, Geertz mengemukakan konsep kebudayaan yang interpretatif, di mana kebudayaan dipandang sebagai teks-teks yang perlu diinterpretasikan maknanya. Pandangan ini sangat berbeda dengan konsep kebudayaan yang sebelumnya

⁴⁷ Daniel L. Pals, *Seven Theories of Religion*, h. 397.

⁴⁸ Vita Fitria, *Interpretasi Budaya*, "Clifford Geertz: Agama Sebagai Sistem Budaya: UIN Sunan Kali Jaga", dalam Gunawan Laksono Aji, "Clifford Geertz dan Penelitiannya Tentang Agama di Indonesia (Jawa)" *Citra Ilmu*, Vol. xii, 24 (Oktober 2016), h. 117.

⁴⁹ Ahmad Sugeng Riady, "Agama dan Kebudayaan Masyarakat Perspektif Clifford Geertz", *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*, Vol. 2, 1 (Maret 2021), h. 16.

diajukan oleh Kluckhohn yang dianggapnya terbatas dan tidak memiliki standar yang baku.⁵⁰

Geertz memperkenalkan pendekatan hermeneutik dalam memahami kebudayaan, dengan mengambil inspirasi dari tokoh-tokoh semiotik seperti Kenneth Burke, Susanne Langer, dan Paul Ricoeur. Baginya, simbol-simbol budaya memiliki peran penting dalam membentuk makna dan tindakan manusia. Geertz menekankan pentingnya nilai-nilai budaya sebagai panduan dalam kehidupan masyarakat, yang melibatkan penilaian-penilaian kolektif yang diwariskan secara historis.⁵¹

Dalam penelitiannya, Geertz juga mempelajari hubungan antara agama Islam dan masyarakat Jawa yang sinkretik. Ia mengamati bahwa masyarakat Jawa tidak hanya mempercayai hal-hal gaib dan menjalankan ritual, tetapi juga memiliki pandangan bahwa alam diatur berdasarkan hukum-hukumnya dan manusia memiliki peran aktif di dalamnya. Salah satu aspek yang mencolok dalam kehidupan orang Jawa adalah penggunaan numerologi dalam berbagai aspek kehidupan mereka, yang diyakini memiliki keabsahan dan kekuatan. Hal ini menimbulkan asumsi bahwasanya orang Jawa tidak sepenuhnya melepaskan keyakinan dahulu mereka ketika memeluk agama Islam.⁵²

Pemahaman Geertz tentang kebudayaan simbolik memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana makna dan simbol-simbol

⁵⁰ Gunawan Laksono Aji, "Clifford Geertz dan Penelitiannya Tentang Agama di Indonesia (Jawa)" *Citra Ilmu*, Vol. xii, 24 (Oktober 2016), h. 116

⁵¹ Juniawandahlan, "Clifford Geertz", <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/mkn/clifford-geertz/>, 22 Februari 2017, diakses tanggal 05 Juni 2023

⁵² Juniawandahlan, "Clifford Geertz", <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/mkn/clifford-geertz/>, 22 Februari 2017, diakses tanggal 05 Juni 2023

membentuk tindakan manusia dalam konteks budaya dan agama tertentu. Khususnya dalam masyarakat Jawa, pendekatan Geertz memberikan pemahaman yang kaya akan dinamika budaya dan agama. Ia menyoroti pentingnya interpretasi makna dalam konteks budaya, di mana simbol-simbol menjadi kunci untuk memahami tindakan dan perilaku masyarakat. Geertz berhasil menggambarkan kompleksitas hubungan antara kebudayaan dan agama Islam dalam masyarakat Jawa yang sinkretik, serta betapa simbol-simbol dan makna yang diwariskan secara historis memiliki pengaruh yang signifikan.⁵³

Dalam 80 tahun perjalanan hidupnya, Geertz meluangkan waktu lebih dari 10 tahun untuk melakukan penelitian lapangan di Jawa, Bali, dan Maroko. Selama 30 tahun berikutnya, dia mendedikasikan dirinya untuk menulis tentang hasil penelitiannya dengan tujuan untuk mengenalkan daya tarik studi kebudayaan kepada orang lain. Karya-karyanyapun masih menjadi rujukan di kalangan para akademisi.⁵⁴

Karya-karya Geertz mencakup berbagai topik. Beberapa karyanya yang terkenal meliputi *The Development of Javanese Economy: A Socio-Cultural Approach* (1956); *The Religion of Java* (1960), yang dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa* (1981); *Peddlers and Princes: Social Development and Economic Change in Two Indonesian Towns (Comparative Studies of New Nations)*

⁵³ Gunawan Laksono Aji, "Clifford Geertz dan Penelitiannya Tentang Agama di Indonesia (Jawa)" *Citra Ilmu*, Vol. xii, 24 (Oktober 2016), h. 116

⁵⁴ Ahmad Sugeng Riady, "Agama dan Kebudayaan Masyarakat Perspektif Clifford Geertz", *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*, Vol. 2, 1 (Maret 2021), h. 16

(1963); *Agricultural Involution: the Processes of Ecological Change in Indonesia* (1963), yang dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*; *The Social History of an Indonesian/Javanese Town* (1965); *Islam Observed: Religious Development in Morocco and Indonesia* (1968); *The Interpretation of Cultures* (1973); *Myth, Symbol, and Culture* (1974); *Negara: the Theater State in Nineteenth-Century Bali* (1980); *Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology* (1983); *Works and Lives: the Anthropologist as Author* (1988); *After the Fact: Two Countries, Four Decades, One Anthropologist (The Jerusalem-Harvard Lectures)* (1995); *Available Light: Anthropological Reflections on Philosophical Topics*; *The Fate of 'Culture': Geertz and Beyond (Representations Books)*; *Geiger at Antioch (George Geiger, Professor at Antioch College): an Article from the Antioch Review*; *New Views of the Nature Man*.⁵⁵

Selain itu, Geertz juga menyumbangkan banyak artikel dalam jurnal-jurnal antropologi dan buku-buku lainnya. Artikel-artikel terkenalnya mencakup topik seperti *Ethos, World-view and the Analysis of Sacred Symbols* (1958); *The Growth of Culture and the Evolution of Mind* (1962); *Ideology as a Cultural System* (1964); *Internal Conversion in Contemporary Bali* (1964), dan masih banyak lagi.

Keseluruhan karya Clifford Geertz mencerminkan kontribusi yang luar biasa dalam bidang antropologi. Penekanan Geertz pada interpretasi

⁵⁵ Gunawan Laksono Aji, "Clifford Geertz dan Penelitiannya Tentang Agama di Indonesia (Jawa)" *Citra Ilmu*, Vol. xii, 24 (Oktober 2016), h. 118

kebudayaan dan pemahaman mendalam tentang peran simbol-simbol budaya telah membantu mengembangkan wawasan tentang keragaman manusia dan peran kebudayaan dalam kehidupan masyarakat. Meskipun telah meninggal, pengaruh dan pemikirannya masih terus memberikan inspirasi bagi para peneliti dan akademisi hingga saat ini.

5. Trikotomi Santri, Priyayi dan Abangan

Pada penelitiannya di Mojokuto, Clifford Geertz menemukan tiga varian yang berbeda pada masyarakat Jawa yakni abangan, santri, dan priyayi. Ketiga varian ini juga menunjukkan perilaku keberagaman, struktur sosial, dan ideologi politik yang berbeda. Selain itu, ketiganya juga memiliki pemaknaan yang berbeda-beda berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan keseharian. Santri, Priyayi, dan Abangan adalah tiga varian agama yang disimpulkan oleh Geertz lewat bukunya *The Religion of Java*. Geertz berpendapat bahwasanya agama bukan hanya sebatas hubungan antara manusia dan tuhan. Namun, disisi lain, juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya. Simbol-simbol yang dimunculkan kerap kali berbeda jauh dari hubungan manusia dan tuhan, melainkan sengaja diciptakan oleh manusia karena pengaruh lingkungan sosial dan budaya. Dalam kesimpulan Geertz, Santri digambarkan sebagai mereka yang menjalankan perintah ajaran islam dan menempati pasar sebagai. Abangan adalah varian yang secara umum merupakan mereka yang berprofesi sebagai petani, pengrajin dan buruh-buruh kecil serta memegang kuat faham animisme seperti *selamatan*, kepercayaan terhadap makhluk halus, serta hal-hal yang bernuansa mistik Jawa lainnya.

Terakhir adalah Priyayi. Priyayi digambarkan Geertz sebagai orang yang menduduki birokrasi pemerintahan. Sifat sopan santun, seni tinggi, dan mistisme intuitif yang memiliki kaitan erat dengan kekeratonan Hindu-Jawa menjadi ciri khas dari varian Priyayi.⁵⁶

Nasruddin berpendapat, sebagaimana yang dikutip oleh Sugeng Riady, bahwasanya dalam struktur sosial masyarakat Jawa, kaum abangan biasanya berada pada lapisan yang paling bawah, dengan mayoritas dari mereka bekerja sebagai petani. Di atas mereka, terdapat kalangan santri yang umumnya berprofesi sebagai pedagang di pasar. Kelompok ini memiliki akses yang lebih mudah terhadap sirkulasi ekonomi dan memiliki koneksi jaringan dengan dunia luar. Di puncak struktur sosial terdapat golongan priyayi yang jumlahnya relatif sedikit.⁵⁷

a. Santri.

Bagi seorang santri, peribadatan merupakan hal yang benar-benar penting hingga menjadikan sembahyang sebagai tanda terhadap mereka yang benar-benar santri atau bukan. Jenis santri beraneka ragam, mulai dari santri yang mengidentifikasi diri sebagai golongan yang bukan abangan, sampai menjadikan Islam sebagai dominasi dari hampir seluruh kehidupan.⁵⁸

⁵⁶ Subair, "Abangan, Santri, Priyayi: Islam Dan Politik Identitas Kebudayaan Jawa", *DIALEKTIKA*, Vol. 9, No. 2, (Januari-Desember 2015), h. 39.

⁵⁷ Ahmad Sugeng Riady, "Agama dan Kebudayaan Masyarakat Perspektif Clifford Geertz", *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*, Vol. 2, No. 1, 13-22, Maret 2021. Hal. 19.

⁵⁸ Clifford Geertz, *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi Dalam Kebudayaan Jawa*, terj. Aswab Mahasin & Bur Rasuanto (Depok: Komunitas Bambu, 2014), h. 179-180.

Dari ketiga varian yang dikeompokkan Geertz, Santri dan Abangan adalah varian yang memiliki perbedaan yang paling mencolok. Hal ini bisa dilihat dari sikap mereka terhadap adat keagamaan dimana Santri cenderung menekankan keharusan iman terhadap Islam, sementara Abangan cenderung menunjukkan sifat relativisme dan keterkaitan yang kurang terhadap adat keagamaan mereka. Selanjutnya adalah perbedaan dari sisi organisasi sosial, dimana Santri memiliki rasa komunitas yang kuat, di mana Islam dipandang sebagai serangkaian lingkaran sosial yang semakin meluas dari individu santri hingga seluruh dunia Islam. Sementara Abangan menjadikan rumah tangga sebagai unit sosial utama. Hal ini dibuktikan Geertz lewat acara bersih desa yang mana rumah-tangga-rumah-tangga dari berbagai desa menyumbangkan sesuatu demi acara tersebut. Peran petani Jawa dalam kehidupan keagamaan juga berbeda antara abangan dan santri. Petani Jawa dalam tradisi abangan cenderung menjauhkan diri dari komunitas keagamaan dan menyimpan gagasan-gagasannya sendiri. Tidak ada komunitas keagamaan yang terorganisir secara signifikan di kalangan abangan. Di sisi lain, santri memiliki kesadaran sebagai satu komunitas umat Islam. Mereka melihat Islam sebagai komunitas yang semakin meluas dan menghubungkan individu-santri dengan komunitas yang lebih luas, seperti Jawa, Indonesia, dan seluruh dunia Islam.⁵⁹

Dalam berpolitik, Santri Mojokuto umumnya menjadi anggota Masyumi atau Nahdatul Ulama, atau menganggap diri mereka sebagai

⁵⁹ Geertz, *Agama Jawa*, h 180-181

pengikut salah satu dari kedua organisasi tersebut. Bagi mereka, partai politik bukan sekadar kelompok rakyat yang memilih partai yang sama, melainkan merupakan organisasi sosial, persaudaraan, rekreasi, dan keagamaan. Partai politik Islam dianggap sebagai wadah yang menggabungkan ikatan kekeluargaan, ekonomi, dan ideologi, serta mendesak komunitas untuk mendukung nilai-nilai sosial yang mengatur berbagai aspek kehidupan. Menjadi anggota partai politik Islam berarti mengikatkan diri pada penafsiran doktrin sosial Islam yang berbeda-beda.⁶⁰

b. Priyayi.

Jika kaum abangan adalah petani Jawa, maka Priyayi adalah golongan ningratnya. Agama Abangan mewakili sintesis petani alian unsur yang diterimanya dari kotadan warisan kesukuannya, sinkretisme berbagai potongan tus dari selusin sumber yang disusun menjadi satu kumpulan utuh untuk melayani kebutuhan masyarakat.⁶¹

Kaum Priyayi umumnya mendiami kota-kota, dan hal ini merupakan salah satu ciri menarik dari Jawa modern secara sosiologis. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini, antara lain ketidakstabilan politik pada masa pra-kolonial dan filsafat mereka yang lebih menghargai prestasi mistik daripada keterampilan politik. Selain itu, oposisi dari pihak Belanda terhadap upaya mereka untuk mendekati kaum tani juga mempengaruhi posisi kaum priyayi sebagai pemilik tanah yang berkuasa. Sebagian besar kaum priyayi, kecuali di sekitar Mojokuto, bukanlah tuan tanah dengan

⁶⁰ Geertz, *Agama Jawa*, h. 231-232.

⁶¹ Geertz, *Agama Jawa*, h .329.

pengikut atau budak di lahan yang luas. Mereka mayoritas adalah birokrat, pegawai, dan guru yang berasal dari kalangan bangsawan kerah putih.⁶²

Tiga poin utama kehidupan "keagamaan" priyayi meliputi etiket, seni, dan praktik mistik. Ketiga faktor ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Etiket mencakup adat yang pantas dalam pergaulan dan memberikan dimensi spiritual pada perilaku sehari-hari. Seni mengungkapkan makna melalui gerak dan pola pikir yang terdisiplin. Praktik mistik mengarahkan pikiran dan perasaan menuju sumber-sumber spiritual untuk mencapai kebijaksanaan tertinggi. Unsur yang mengikat ketiganya menjadi satu adalah apa yang disebut sebagai "rasa" dalam budaya Jawa, yang merupakan modus berbeda dari realitas yang sama.⁶³

Priyayi tidak pernah terlibat dalam bisnis karena mereka tidak memiliki keterampilan dagang. Dagang bukanlah tugas turun-temurun mereka, melainkan sebagai prajurit dan pejabat pemerintahan. Mereka tidak mampu dan merasa tidak nyaman dalam berdagang. Mereka menyadari bahwa berdagang akan mengganggu ketenangan pikiran dan kebahagiaan batin mereka. Keterampilan dagang lebih umum ditemukan di kalangan non-priyayi, terutama di Solo, Yogyakarta, dan Kudus. Pola pikir yang berbeda berlaku di kalangan ini yang dianggap lebih rendah daripada priyayi. Orang-orang non-priyayi memiliki tugas turun-temurun yang sama dan jiwa yang setara, sementara seorang pedagang hanya memikirkan

⁶² Geertz, *Agama Jawa*, h 329-330.

⁶³ Geertz, *Agama Jawa*, h. 343.

kebutuhan pribadinya tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.⁶⁴

Orientasi keagamaan priyayi sulit dibedakan dengan abangan daripada dengan santri karena perubahan agama dari politeisme Asia Tenggara ke monoteisme Timur Tengah lebih signifikan daripada pergeseran agama ke panteisme Hindu-Buddha. Ciri-ciri yang akan saya bahas dalam kategori priyayi juga berlaku untuk kelompok lain. Misalnya, orkes gamelan dan pertunjukkan wayang tidak eksklusif bagi priyayi, tetapi pemeliharannya, penjelasan makna filosofis, dan aspek keagamaannya lebih terfokus pada priyayi. Oleh karena itu, gaya hidup ningrat yang mencakup hal-hal tersebut dianggap sebagai model kehidupan yang beradab oleh sebagian anggota masyarakat, termasuk santri, meskipun dengan beberapa rasa enggan.⁶⁵

c. Abangan.

Abangan adalah varian yang menekankan aspek animistis dan sinkretisme Jawa yang serba melingkupi dan secara luas terkait dengan elemen petani.⁶⁶ Geertz menggambarkan Abangan sebagai varian yang memiliki ciri-ciri gemar melaksanakan upacara kecil dan sederhana yang disebut *selamatan*. Dalam slametan, berbagai orang dari berbagai latar belakang duduk bersama, termasuk tetangga, rekan kerja, sanak keluarga, arwah nenek moyang, dan dewa-dewa yang hampir terlupakan. Mereka terikat dalam sebuah kelompok sosial yang berkomitmen untuk saling

⁶⁴ Geertz, *Agama Jawa*, h. 332.

⁶⁵ Geertz, *Agama Jawa*, h. 337.

⁶⁶ Geertz, *Agama Jawa*, h. xxxii.

tolong-menolong dan bekerja sama. Slametan digunakan untuk merayakan dan menghormati berbagai peristiwa, mulai dari kelahiran, pernikahan, kematian, hingga kegiatan politik. Meskipun slametan mengalami perubahan dalam bentuk dan kurang efisien sebagai mekanisme integrasi di perkotaan, tetapi bagi kelompok abangan, seperti petani tradisional dan mereka yang terproletarisasi, slametan masih memiliki daya tarik dan kekuatannya. Upacara ini selalu melibatkan hidangan khas, dupa, doa Islam, dan pidato tuan rumah dalam bahasa Jawa yang resmi. Slametan menghadirkan suasana yang sopan dan penting meskipun sederhana dan tidak dramatis.⁶⁷

Sebelum melanjutkan pembahasan mengenai abangan dengan lebih jauh, Geertz memasukkan sedikit sempalan pembahasan mengenai dikotomi *kuno* dan *modern*. Orang-orang kuno kebanyakan memegang teguh pemaaman dan keyakinan yang telah lama diyaini dan dijalani oleh komunitasnya. Lain halnya dengan modern yang lebih cenderung berniat mengubah kepercayaan pada masa lampau agar selaras dengan apa yang mereka anggap sebagai tuntutan masa kini.⁶⁸

Perbedaan antara yang kuno dan modern terlihat sangat jelas di kalangan santri, yang menyebabkan perpecahan serius dalam kelompok tersebut. Namun, perbedaan ini mempengaruhi seluruh masyarakat dan semua kategori. Di kalangan abangan, munculnya sebuah sekte politik-religius menarik perhatian, di mana kepercayaan agama Jawa "asli"

⁶⁷ Geertz, *Agama Jawa*, h. 3-4.

⁶⁸ Geertz, *Agama Jawa*, h. 157.

dipadukan dengan nasionalisme Marxis, memungkinkan para pengikutnya mendukung kebijakan politik komunis di Indonesia sambil mempertahankan upacara-upacara abangan dan membersihkannya dari pengaruh Islam. Sekte ini, yang disebut Permai, merupakan upaya untuk memberikan relevansi masa kini kepada kepercayaan abangan tradisional, dengan memberikan makna kepada entitas halus dalam budaya Jawa, praktik slametan, dan pengobatan, dalam konteks sosial yang berbeda dari asalnya. Permai juga berfungsi sebagai partai politik nasional dengan perwakilan di parlemen, organisasi pusat, dan program partai. Pernyataan resmi Permai dalam almanak partai politik tahun 1951 yang diterbitkan oleh Departemen Penerangan menggambarkan ciri umum dari partai tersebut. Permai merupakan partai politik yang saat itu melekat dengan abangan.⁶⁹

Ketegangan antara priyayi dan abangan diekspresikan secara halus, berbeda dengan ketegangan antara keduanya dengan kaum santri. Konflik ini terfokus pada moralisme santri yang dianggap sok suci, yang dibenci oleh kalangan abangan. Namun, konflik juga terjadi dalam hal pola ideologi, universalisme, dan ajaran keselamatan santri, yang menjadi sasaran serangan dari kaum abangan yang pragmatis dan relativistis.⁷⁰

Dalam pertikaian antara priyayi dan santri, kritik terhadap kemunafikan dan intoleransi santri sering dikaitkan dengan perbedaan dalam kepercayaan teoretis. Di sisi santri, serangan juga tak kalah tajam. Mereka menganggap kaum abangan sebagai penyembah berhala dan

⁶⁹ Geertz, *Agama Jawa*, h. 157-158.

⁷⁰ Geertz, *Agama Jawa*, h. 513-514.

menuduh priyayi tidak bisa membedakan diri dengan Tuhan, serta cenderung menganggap setiap orang di luar kelompoknya sebagai komunis.⁷¹

Konflik antara priyayi dan abangan mencerminkan ketegangan kelas yang terutama terkait dengan status. Priyayi sering menuduh orang desa tidak mengenal batasan dan mengganggu keseimbangan sosial masyarakat. Mereka juga mengkritik orang desa karena memiliki ambisi yang berlebihan dan gagal meniru gaya hidup priyayi.⁷²

Santri, priyayi dan abangan memiliki faktor yang mencegah ketiganya mencapai efek penuh di dalamnya yang mana efek tersebut berupa kenyataan bahwa pola-pola nilai yang universal dalam artikulasi budaya dan sistem sosial di mana-mana, tidak dilembagakan secara langsung, murni tanpa distorsi, melainkan diintegrasikan ke dalam sistem sosial yang terdiferentasi sedemikian rupa, sehingga struktur sosial yang dihasilkan tidak mencerminkan organisasi kebudayaan dengan cara yang sederhana. Alasan yang menjadi pembenaran dari hal tersebut adalah bahwa kekuasaan-kekuatan pengorganisir yang muncul dari agama, stratifikasi, geografi, ekonomi dan sebagainya, tidak semuanya berjalan ke arah yang sama.⁷³

Maka dari itu, tidak mengherankan apabila terdapat seorang abangan yang memiliki ciri seperti santri dengan berjualan di pasar. Sama halnya

⁷¹ Geertz, *Agama Jawa*, h. 514-515.

⁷² Geertz, *Agama Jawa*, h. 517.

⁷³ Geertz, *Agama Jawa*, h. 533.

dengan santri yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi akan lebih mirip seperti priyayi ketimbang santri itu sendiri.

Meskipun ketiga varian masyarakat Jawa tersebut memiliki potensi konflik, menurut Shonhaji, faktanya ada faktor-faktor yang memperkuat integrasi di antara mereka. Salah satunya adalah rasa kesadaran bahwa budaya yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari terikat dengan budaya Jawa yang sama. Selain itu, ada pihak-pihak yang secara tidak langsung dapat berbaur dengan baik di kelompok abangan, santri, dan priyayi. Mereka menjadi jalan tengah dan penengah ketika konflik antara ketiga varian masyarakat tersebut muncul. Terakhir, pada hari-hari besar atau ritual tertentu seperti Lebaran dan slametan, ketiga varian tersebut saling berinteraksi baik secara verbal maupun fisik.⁷⁴

B. Figur Politisi

Dalam KBBI kata figure bisa diartikan sebagai; *Pertama*, bentuk atau wujud. *Kedua*, tokoh.⁷⁵ Sedangkan kata politisi menurut KBBI diartikan sebagai orang-orang yang bergerak dalam bidang politik atau ahli politik.⁷⁶ Dalam KBBI terdapat makna yang sama antara politisi dan politikus. Namun, mengutip dari laman Kompas.id dengan judul artikel Beda “Politisi” dan “Politikus”, seorang pakar bahasa JS Badudu menyatakan bahwasanya keduanya merupakan serapan dari Bahasa Belanda. Kata *politisi* berasal dari kata *politici* dan *politikus* berasal dari *politicus*. Dalam bahasa Belanda politikus merupakan bentuk tunggal,

⁷⁴ Ahmad Sugeng Riady, “Agama dan Kebudayaan, h. 19.

⁷⁵ “Arti Kata Figur”, <https://kbbi.web.id/figur>, diakses tanggal 17 Juni 2023.

⁷⁶ “Arti Kata Politisi”, <https://kbbi.web.id/politisi>, diakses tanggal 17 Juni 2023.

sedangkan politisi merupakan bentuk jamak. Kendati demikian, masih banyak orang yang kurang setuju dengan pendapat Badudu.⁷⁷

Dan Nimmo menamakan orang yang bercita-cita untuk dan atau jabatan pemerintah yang berkomunikasi tentang politik, tak peduli mereka dipilih, ditunjuk, atau pejabat karir, dan tidak mengindahkan apakah jabatan itu eksekutif, legislatif, atau yudikatif.⁷⁸

Esensi dari figur itu sendiri memiliki esensi yang sama dengan tokoh, pemimpin, atau elit. Hamdi Muluk berkata, sebagaimana yang dikutip oleh M. Ridoi, bahwasanya seorang pemimpin tidak harus memiliki keterampilan yang luar biasa, pemimpin hanya dituntut memiliki kualitas akhlak yang baik dan keteladanan yang luar biasa, amanah, dan segala tingkah lakunya harus bisa menjadi tauladan bagi para pengikutnya.⁷⁹

Berangkat dari hal tersebut, seorang figur dapat dinilai sulit untuk menjadi pemimpin apabila tidak memiliki kriteria seperti seorang pemimpin. Seorang individu bisa menjadi seorang pemimpin karena adanya kepercayaan serta legitimasi dari publik, dan itu semua bisa didapatkan apabila masyarakat sudah melihat keteladanan, kredibilitas, dan kemampuan untuk memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada di masyarakat.⁸⁰

C. Representasi Politik

⁷⁷ FX Sukoto, "Beda "Politisi" dan "Politikus"", Kompas.id, <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/09/18/beda-politisi-dan-politikus>, 18 September 2021, diakses tanggal 18 Juni 2023.

⁷⁸ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik; Komunikator, Pesan, dan Media* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h. 30.

⁷⁹ M. Ridoi, "Kekuatan Figur Dalam Partai Politik (Studi Terhadap Abdurrahman Wahid di Partai Kebangkitan Bangsa)", (Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016), h. 20.

⁸⁰ M. Ridoi, "Kekuatan Figur Dalam Partai Politik", h. 21.

John Fiske mengungkapkan bahwasanya representasi adalah suatu proses di mana realitas diungkapkan melalui komunikasi menggunakan kata-kata, suara, gambar, atau kombinasi dari semuanya. Sedangkan, Yasraf A. Piliang mengatakan bahwa representasi juga dapat berarti sebagai suatu tindakan yang menghadirkan atau mempresentasikan sesuatu lewat sesuatu yang di luar dirinya, biasanya berupa tanda atau simbol.⁸¹

Representasi politik secara sederhana dapat diartikan sebagai "menghadirkan yang tidak ada atau yang tidak hadir". Lebih lanjut Nuri Suseno mengatakan bahwasanya perkembangan representasi politik dapat diamati dari sejauh mana keberadaan Negara dalam melaksanakan demokrasi yang mana hal ini dipengaruhi oleh perubahan fenomena politik.⁸²

Terdapat empat pandangan berbeda mengenai representasi menurut Hanna Pitkin, yaitu formal, substantif, simbolis, dan deskriptif. Pandangan Formal dan deskriptif melihat representasi sebagai cara bertindak atau bertindak atas nama orang lain. Sementara itu, pandangan simbolis dan substantif melihat representasi sebagai cara menjadi atau mewakili sesuatu. Pitkin berpendapat bahwasanya pandangan representasi tradisional cenderung memiliki fokus yang kuat pada pemilihan umum, baik dalam gagasan maupun praktiknya, serta fokus yang kuat

⁸¹ Bagas Maulana dkk, "Representasi Peristiwa Pidato Joko Widodo Pada Media kompas.com "Politikus Sontoloyo": Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk, *Jurnal Politikom Indonesia*, Kajian Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi, Vol. 5, No. 1 (Juni 2020), h. 228.

⁸² Juhana Nasruddin, "Politik Identitas dan Representasi Politik (Studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022)", *Hanifiya*, Jurnal Studi Agama-agama, Vol. 1, No. 1, (2018), h. 37.

pada karakter dan penampilan perwakilan, namun sering mengabaikan kepentingan yang diwakilinya.⁸³

D. Citra

1. Citra dan Pencitraan

Citra merupakan gambaran diri publik terhadap perusahaan, organisasi atau lembaga, kesan yang sengaja di ciptakan dari suatu objek orang atau organisasi. Citra juga bisa didefinisikan sebagai segala bentuk atau sesuatu yang sengaja dibuat dan ditampilkan oleh lembaga, organisasi, atau orang untuk mendapatkan citra positif dari masyarakat. Citra juga merupakan modal yang penting dalam berkomunikasi dengan masyarakat dalam membentuk opini publik yang kuat. Opini publik yang sudah terbentuk akan mengarahkan masyarakat untuk bersikap partisipatif dan fanatik terhadap orang yang di sukainya atau pemimpinnya.⁸⁴ Selanjutnya pencitraan dapat difahami sebagai upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan citra positif dari publik.

Seiring dengan majunya teknologi komunikasi, pencitraan tidak hanya digaungkan lewat media konvensional seperti majalah, koran dan tabloid berita, pencitraan juga digaungkan lewat kanal-kanal digital melalui pencitaan gambar, biasanya dari adegan fisik. Istilah pencitraan digital sering dianggap menyiratkan atau meliputi pengolahan, kompresi, penyimpanan, percetakan,

⁸³ Juhana Nasruddin, "Politik Identitas", h. 39.

⁸⁴M. Alfin Fatikh, "*Komunikasi Citra Jokowi Pasca Viral#2019GANTIPRESIDEN*", h.36.

dan menampilkan gambar tersebut. Metode yang paling umum adalah dengan fotografi digital dengan kamera digital, tetapi metode lain juga digunakan.⁸⁵

Jika politisi diibaratkan sebagai sebuah produk, pencitraan baginya adalah sebuah keniscayaan. Pencitraan selama ini selalu identik dengan produk atau jasa yang akan dipasarkan. Namun sejak Pemilu dilaksanakan secara proporsional terbuka untuk DPR dan pemilihan langsung untuk presiden, pencitraan menjadi bagian yang sangat penting dalam sistem pemasaran politik. Pemasaran politik sendiri merupakan metode praktis dalam konteks komunikasi politik. Pencitraan politik berada pada arsiran pemasaran dan public relations sebagai objek studi dalam ilmu komunikasi.⁸⁶

2. Citra Politik

Citra dapat diartikan sebagai persepsi atau gambaran yang dimiliki oleh masyarakat terkait suatu produk, individu, perusahaan, atau lembaga tertentu. Dalam konteks politik, citra politik merujuk pada strategi yang digunakan oleh aktor politik atau partai politik untuk menciptakan gambaran yang positif tentang diri mereka dan lembaga politik yang mereka wakili di hadapan masyarakat luas. Citra politik secara erat terkait dengan identitas seorang politikus dan mencerminkan persepsi yang diberikan oleh masyarakat untuk membentuk pandangan mereka tentang sosok politik tersebut.⁸⁷

⁸⁵Pencitraan digital - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, https://id.wikipedia.org/wiki/Pencitraan_digital., diakses tanggal 12 Desember 2022.

⁸⁶ Dudi Rustandi, "Pencitraan Politik Daring: Strategi Memenangkan Massa Digital Menjelang Pemilu 2014", *Observasi*, Vol. 11, No.2 (2013), h. 95.

⁸⁷ Fajar Mu'ti Abdillah, Abraham Zakky Zulhazmi, "Kampanye Digital, Politik Lokal, dan Media Sosial", *Iqtida: Journal of Da'wah and Communication*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2021), h. 59.

Dalam konteks politik pula, citra adalah gambaran publik tentang dunia politik, dan karena pada diri politik adalah wilayah, kontestasi, kompetisi dan konflik yang lahir karena perebutan kekuasaan, maka citra politik dapat bermakna gambaran dan perspsi publik tentang otoritas, kekuasaan, kewenangan, konsesus dan konflik yang mempunyai makna tersendiri.⁸⁸

Di era digital seperti sekarang ini, dimana informasi mudah didapat dan kian deras, terutama dari platform digital seperti media sosial mengakibatkan banyak sekali masyarakat yang menggunakan media sosial sebagai media untuk mencari berita terkait politik serta politisi. Di sisi yang lain para politisi berusaha membranding dan mencitrakan diri mereka sebaik mungkin demi mendapatkan simpati serta dukungan dari target pendukungnya. Hal ini terkadang menimbulkan subjektifitas dalam memahami pesan politik yang ditampilkan oleh politisi.

Tidak heran jika citra politik di media sosial selalu mengandung unsur subjektivitas yang ditandsai oleh perasaan, sikap dan perasaan politik tertentu yang mempunyai kegunaan dan manfaat.⁸⁹

3. Penguatan Pencitraan

Kegiatan mencitrakan diri berbasis digital hari ini mulai lazim dilakukan oleh para aktor politik. Tidak hanya kampanye menggunakan metode konvensional seperti memobilisasi masa dan juga memasang baliho di jalanan, saat ini para aktor politik baik ditingkat nasional maupun tingkat lokal

⁸⁸ Arifin, *Komunikasi Politik; Paradigma, Teori, Aplikasi, Strategi & Komunikasi Politik Indonesia*. (Jakarta: Balaipustaka, 2003), h. 106.

⁸⁹ Pencitraan digital - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, https://id.wikipedia.org/wiki/Pencitraan_digital., diakses tanggal 12 Desember 2022.

mulai menggunakan media sosial sebagai salah satu pencitraan diri para politisi. Beragam metode pembentuk citra diri yang dilakukan para politisi namun saat ini yang paling populer digunakan adalah membentuk citra politik melalui media sosial, salah satunya adalah media sosial Instagram.⁹⁰

Pencitraan politik melalui media sosial Instagram saat ini sudah banyak dilakukan oleh para politisi. Bahkan sudah banyak politisi sudah mendapat pengikut yang cukup banyak di media sosial Instagram. Sebut saja gubernur Jawa Barat yang juga politisi representasi tokoh tanah pasundan, Ridwan Kamil yang sudah mempunyai 13,5 juta lebih pengikut di Instagram. Dan juga gubernur Jawa tengah, Ganjar Pranowo yang sudah mempunyai pengikut Instagram sebanyak 3,3 juta lebih.⁹¹

Penguatan pencitraan dalam konteks politik bisa disimpulkan merujuk pada upaya politisi atau kandidat untuk membangun dan memperkuat citra mereka di mata publik. Hal ini dilakukan melalui berbagai strategi komunikasi dan tindakan yang dirancang untuk menciptakan persepsi positif terhadap politisi tersebut. Tujuannya adalah untuk meningkatkan popularitas, kepercayaan, dan dukungan dari pemilih.

E. Pemilihan Umum

Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh untuk meningkatkan kualitas demokrasi melalui penerapan prinsip-prinsip umum demokrasi dalam praktik

⁹⁰ Fajar Mu'ti Abdillah, Abraham Zakky Zulhazmi, "Kampanye Digital, Politik Lokal, dan Media Sosial", *Iqtida: Journal of Da'wah and Communication*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2021), h. 60.

⁹¹ Fajar Mu'ti Abdillah, Abraham Zakky Zulhazmi, "Kampanye Digital, Politik Lokal, dan Media Sosial", *Iqtida: Journal of Da'wah and Communication*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2021), h. 61.

politik dan pemerintahan, salah satunya adalah melalui penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas secara LUBER dan JURDIL. Di Indonesia sendiri, Pemilu digelar secara langsung dengan rakyat sebagai pemberi suara (direct voter). Pemilu di Indonesia terdiri atas dua jenis, yakni Pemilu Eksekutif (Pilpres dan Pilkada), serta Pemilu Legislatif (Pileg).⁹²

Kekuasaan untuk menentukan pemerintahan berada di tangan rakyat sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam UUD 1945. Kedaulatan tersebut dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan umum yang diatur dalam Pasal 22E UUD 1945. Pemilihan umum merupakan hubungan antara infrastruktur politik dan suprastruktur politik, serta mekanisme transformasi aspirasi politik partai menjadi kebijakan negara.⁹³

Pemilu merupakan salah satu instrumen untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Meskipun bukan satu-satunya, tidak dimungkiri Pemilu merupakan instrumen utama demokrasi. Melalui Pemilu, hak-hak politik warga negara seperti hak memilih (right to elect) dan dipilih (right to be elected) mendapatkan wahana untuk diaktualisasikan. Melalui Pemilu, warga negara dapat menyalurkan aspirasinya, serta menetapkan preferensinya mengenai siapa wakil-wakilnya yang akan duduk di posisi eksekutif maupun legislatif.⁹⁴

Pemilu juga merupakan medium untuk terjadinya sirkulasi elit. Sebagai contoh, melalui Pilpres dan Pilkada, elit yang duduk sebagai presiden, wakil

⁹² Boy Anugrah, "Politik Aliran, Sirkulasi Elit dan Pilpres 2024", *Lusor; Literasi Unggul of Research*, https://www.researchgate.net/publication/352981577_Politik_Aliran_Sirkulasi_Elit_dan_Pilpres_2024, Juli 2021, diakses tanggal 13 Juni 2023

⁹³ Jimly Assidiqy, "Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 3, No. 4 (Desember, 2006), hal. 10.

⁹⁴ Boy Anugrah, "Politik Aliran, Sirkulasi Elit dan Pilpres 2024".

presiden, gubernur, bupati, dan walikota, mengalami pergantian secara berkala. Pergantian secara berkala ini merupakan konsekuensi dari skema fixed term masa jabatan untuk para eksekutif tersebut. Mereka memiliki masa jabatan tetap selama lima tahun, serta dapat dipilih kembali untuk kedua kalinya melalui mekanisme Pemilu.⁹⁵

Kata kontestasi memiliki arti kontroversi atau debat atau sistem untuk memperebutkan dukungan rakyat dengan mengikuti sistem pasar.⁹⁶ Sedangkan Pilpres adalah bentuk akronim dari pemilihan presiden yang berarti suatu proses demokrasi dimana rakyat dari suatu daerah memilih pemimpin mereka yang dalam hal ini adalah presiden dan wakilnya.⁹⁷

Dalam konteks Indonesia, kontestasi Pilpres melibatkan persaingan politik antara calon presiden dan wakil presiden. Media sosial memainkan peran penting dalam kontestasi ini. Platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram menjadi tempat di mana para kandidat dan pendukungnya dapat berinteraksi dengan pemilih potensial secara langsung. Para kandidat menggunakan media sosial sebagai alat untuk membangun citra, menyampaikan pesan kampanye, dan mendapatkan dukungan dari publik.

F. Media Sosial Instagram

1. Media Sosial

Media sosial dapat dipahami sebagai suatu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap

⁹⁵ Boy Anugrah, "Politik Aliran, Sirkulasi Elit dan Pilpres 2024".

⁹⁶ Kontestasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Web, <https://kbbi.web.id/kontestasi>, diakses tanggal 8 Desember 2022.

⁹⁷ Pilpres dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Web, <https://kbbi.lektur.id/pilpres>, diakses tanggal 8 Mei 2023.

penggunanya. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan di media sosial, misalnya yaitu melakukan komunikasi atau interaksi hingga memberikan informasi atau konten berupa tulisan, foto dan video. Berbagai informasi dalam konten yang dibagikan tersebut dapat terbuka untuk semua pengguna selama 24 jam penuh.⁹⁸

Media sosial sebagai salah satu instrumen dari *new media* atau media baru, memberi ruang kandidat dalam sebuah pemilihan untuk bisa berinteraksi dengan para calon pemilih dengan skala dan intensitas yang tak bisa dicapai lewat pola kampanye tradisional seperti kampanye dari pintu ke pintu, brosur, bahkan peliputan oleh media cetak dan televisi. Selain itu karakteristik media sosial yang bersifat multimedia dapat kita pahami sebagai medium dengan beragam bentuk konten yang meliputi perpaduan teks, audio, image, animasi, video, dan bentuk konten interaktif.⁹⁹

2. Masyarakat di Era Digital

Perkembangan teknologi yang semakin cepat dan perubahan gaya hidup baru yang tidak dapat dipisahkan dari perangkat elektronik telah memulai babak baru. Setiawan mengatakan bahwa teknologi telah menjadi alat yang dapat membantu manusia dalam pekerjaannya baik sebagian maupun

⁹⁸ Pengertian Media Sosial, Sejarah, Fungsi, Jenis, Manfaat, dan Perkembangannya, Gramedia Literasi, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-media-sosial/>, diakses tanggal 12 Desember 2022

⁹⁹ Muhammad Fikri dkk, "Pengelolaan Kampanye Digital Pasangan Karna Suswandi-Khoirani (Karunia) Pada Pilkada Situbondo 2020", *Journal Publicuho*, Vol. 5, No. 2 (November-Januari 2022), h. 1240.

secara keseluruhan. Oleh karenanya, peran penting teknologi ini adalah membawa manusia memasuki era digital.¹⁰⁰

Asal-usul kata digital sebenarnya berasal dari kata digit yang memiliki arti angka atau bilangan. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan representasi data dalam bentuk angka atau sinyal diskrit yang terdiri dari angka-angka 0 dan 1. Kata digit sendiri berasal dari bahasa Latin digitus yang berarti jari. Oleh karena itu, era digital dapat diartikan sebagai era komputerisasi di mana seluruh kegiatan manusia dapat disosialisasikan melalui media teknologi komputer (multilayar) dengan berbagai representasi, bentuk, numerik, dan model narasi yang bervariasi.¹⁰¹

Pada zaman postmodern seperti sekarang, manusia menjalani kehidupan di era yang disebut oleh Jalaluddin Rakhmat yang dikutip oleh Wahyu Budiantoro sebagai era kebanjiran informasi. Paradigma masyarakat mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Dulu, interaksi antarindividu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidup dilakukan secara langsung melalui pertemuan tatap muka. Namun, pola ini saat ini mulai digantikan oleh budaya digital. Yasraf Amir Piliang menyebutnya sebagai Kota Digital atau *Cyberspace City*.¹⁰²

Masyarakat digital yang terbentuk data ini tidak terlepas dari perkembangan media yang semakin pesat disertai aplikasi-aplikasi yang

¹⁰⁰ L. Rudy Rustandi' "Disrupsi Nilai Keagamaan Dan Komodifikasi Agama Di Era Digital. *Sangkep: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*. Vol. 3. No. 1. (Agustus, 2020), hal. 27.

¹⁰¹ Wahyu Budiantoro, "Dakwah di Era Digital", *KOMUNIKA*, Vol. 11, No. 2, (Juli 2017), hal. 273.

¹⁰² Wahyu Budiantoro, "Dakwah di Era Digital", *KOMUNIKA*, Vol. 11, No. 2, (Juli 2017), hal. 273.

menghubungkan dan memudahkan. Hadirnya aplikasi komunikasi seperti WhatsApp, WeChat, Telegram, dan sebagainya, *platform e-commerce* seperti Shopee, Tokopedia, BukaLapak, Lazada, dan sejenisnya, aplikasi pemesanan transportasi seperti KAI Express, Traveloka, Gojek, Grab, dan lain-lain, pembayaran digital melalui PayPal, Dana, GoPay, ShopeePay, dan lain-lain, serta aplikasi pemesanan tiket seperti TIX ID, Tiket.com, dan sebagainya, aplikasi pengedit konten seperti Lightroom, KineMaster, VN, dan lain-lain, mesin pencarian seperti Google, Chrome, Opera, dan sejenisnya, serta aplikasi pemesanan akomodasi seperti Aladdin, Trivago, dan lain-lain, telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dan terhubung dalam segala lini kehidupan. Dengan kehadiran media sosial sebagai platform yang digunakan secara luas untuk berinteraksi, masyarakat dapat saling berhubungan, berbagi informasi, dan membangun komunitas secara online. Aplikasi-aplikasi ini juga telah mempermudah proses belanja, memesan transportasi, membayar secara digital, mencari informasi, dan memesan akomodasi dengan cepat dan mudah. Dengan adanya pergeseran ke arah digital, masyarakat kini dapat terhubung dan berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari dengan lebih efisien dan praktis.

Terdapat banyak motif dalam menggunakan sebuah media, di antaranya kebutuhan kognitif (kebutuhan akan informasi, pengetahuan dan pemahaman), kebutuhan afektif (kebutuhan akan emosi, perasaan dan kesenangan), kebutuhan integratif, personal (kebutuhan akan kredibilitas, stabilitas dan status), kebutuhan integratif sosial (kebutuhan akan interaksi

dengan teman atau keluarga), dan kebutuhan pelepas ketegangan (kebutuhan akan hiburan). Hal ini menunjukkan bahwa tatanan sistem masyarakat Indonesia telah bergeser dari sistem tradisional menuju tatanan sistem yang berpusat kepada informasi. Kondisi semacam ini tentu akan mempengaruhi terbentuknya sistem tata nilai, pengetahuan, keagamaan, tradisi, dan kebudayaan yang baru.¹⁰³

Terbentuknya sistem yang baru dalam masyarakat modern ini menyebabkan adanya dua realitas kehidupan, yakni realitas aktual dan realitas virtual. Ekspresi realitas virtual dalam masyarakat modern ini dilakukan melalui media sosial. Dalam konteks demokratisasi Indonesia, media sosial memiliki implikasi yang sangat besar terhadap ideologi yang kontradiktif; di satu sisi, media sosial mampu menjadi saluran aspirasi dan kritik masyarakat terhadap pemerintah secara terbuka. Namun di sisi lain, media sosial tak jarang menjadi keranjang sampah, di mana segala ujaran kebencian, sikap sektarianistik, hoaks dan fitnah ditumpahkan sebebaskan-bebasnya yang justru mencederai demokrasi itu sendiri.¹⁰⁴

Tetapi yang paling penting diantara semua itu adalah ditemukannya internet. Internet yang semula hanya bisa dijangkau oleh segelintir orang, sekarang sudah menjelma sebagai media baru yang menghubungkan. Oleh karena itu, hadirnya internet sebagai media baru dengan interaktivitas dan konektivitas yang tinggi dewasa ini telah memungkinkan pengembangan aktivitas dakwah yang lebih konvergen dan membedakannya dengan pola

¹⁰³ L. Rudy Rustandi, "Disrupsi Nilai Keagamaan dan Komodifikasi Agama di Era Digital" hal. 25.

¹⁰⁴ L. Rudy Rustandi, hal. 25.

konvensional. Dakwah menjadi lebih mudah, tak terbatas ruang dan waktu serta murah dan terbuka. Perkembangan media internet saat ini telah dibayangkan oleh Marshall McLuhan sejak awal 1960-an, seperti lahirnya pasar online, kampanye online, hingga kehidupan keagamaan yang menggunakan internet dalam berbagai fungsi dan sifatnya.¹⁰⁵

Dampak dari situasi ini adalah kemampuan manusia atau pengguna media sosial (internet) untuk berinteraksi secara global, bahkan dengan akses yang gratis. Terlihat jelas bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia sangat besar, seperti yang dilaporkan oleh We Are Social, sebuah lembaga yang melakukan survei penggunaan internet dan media sosial. Menurut laporan terbaru mereka pada tahun 2020, terdapat 175,4 juta pengguna internet di Indonesia. Mayoritas dari mereka termasuk dalam *Net Generation* atau generasi yang tumbuh dan lahir di era perkembangan teknologi. Namun, perlu diperhatikan bahwa kemajuan teknologi ini juga akan membawa berbagai implikasi sosial di dalam masyarakat.¹⁰⁶

3. Komunikasi Politik dan Kampanye di Media Sosial

Komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi politik antara pemerintah dan masyarakat melalui partai politik. Partai politik berperan sebagai komunikator yang tidak hanya menyampaikan keputusan pemerintah kepada masyarakat, tetapi juga mengkomunikasikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Dalam proses ini, partai politik merumuskan informasi

¹⁰⁵ Irwan A, "Dibawah Bayang-bayang Media: Kodifikasi, Divergendi, dan Kooptasi Agama di Era Internet", *Jurnal Sabda-Fakultas Ilmu Budaya UGM*, Vol 12. No. 2, hal. 16.

¹⁰⁶ Ummah, A. H, "Dakwah Digital dan Generasi Milenial". *Mataram*, Vol. 8, No. 1, (2020), hal. 56.

agar mudah dipahami oleh penerima informasi, memungkinkan terjemahan kebijakan pemerintah ke dalam bahasa yang dimengerti masyarakat, serta menerjemahkan aspirasi masyarakat ke dalam bahasa yang dapat dipahami oleh pemerintah. Ini memungkinkan komunikasi politik yang efektif antara pemerintah dan masyarakat.¹⁰⁷

Hadirnya media sosial juga memberikan dampak bagi dunia politik internasional. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya partisipasi aktif dari banyak negara berkembang dalam percaturan global, serta memudahkan negara-negara berkembang untuk mengakses setiap informasi politik luar negeri secara akurat.¹⁰⁸

Sebagaimana dikutip oleh Muhammad Fikri, Haidir Fitra Siagian mengatakan bahwa terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam menggunakan media sosial sebagai alat media komunikasi politik agar memiliki pengaruh yang efektif kepada khalayak. *Pertama* mengetahui latar belakang khalayak. *Kedua* Proses penyampaian pesan yang sesuai dengan kebutuhan khalayak. *Ketiga* Komunikator politik yang handal.¹⁰⁹

Selain digunakan sebagai media komunikasi politik, media sosial juga digunakan sebagai media kampanye politik. Menurut Rogers & Storey sebagaimana dikutip Muhammad Iqbal, kampanye dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk mencapai efek tertentu pada sejumlah besar khalayak. Kampanye ini dilakukan

¹⁰⁷ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Grasindo, 1992), h. 119-120.

¹⁰⁸ Soffa Ranti, "5 Dampak Positif Perkembangan Iptek bagi Kehidupan Manusia", <https://tekno.kompas.com/read/2023/01/28/03000077/5-dampak-positif-perkembangan-ipitek-bagi-kehidupan-manusia>, 28 januari 2023, diakses 12 Juni 2023.

¹⁰⁹ Muhammad Fikri dkk, "Pengelolaan Kampanye Digital", h. 1237.

secara berkelanjutan dalam periode waktu yang ditentukan. Dalam konteks ini, kampanye merupakan upaya yang sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi persepsi, sikap, atau perilaku khalayak dengan menggunakan strategi komunikasi yang telah dirancang dengan matang.¹¹⁰

Dunia politik sangat dipengaruhi oleh dunia maya, digital, dan internet. Bagi para politisi, strategi komunikasi melalui internet menjadi kunci untuk mendapatkan kekuasaan. Metode kampanye politik yang sebelumnya terkenal seperti *money politics*, pesta rakyat, poster, dan baliho kini perlahan digantikan oleh internet dan kemajuan teknologi yang pesat saat ini.¹¹¹

Pada tahun 2020 lalu negara kita mengadakan Pilkada serentak yang dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Masa kampanye Pilkada 2020 sendiri berlangsung selama 71 hari dimulai pada 26 September dan berakhir pada 5 Desember. Pilkada ini diselenggarakan ditengah situasi pandemi covid -19 dimana masing-masing kandidat harus mematuhi protokol kesehatan seperti membatasi kerumunan manusia. Kondisi ini menuntut para politisi untuk berinovasi dalam melakukan kampanye, yang biasanya dilakukan dengan mengumpulkan masa di suatu lokasi dan bertatap muka secara langsung harus dibatasi karena penerapan protokol kesehatan. Oleh karenanya kampanye

¹¹⁰ Muhammad Iqbal, dkk, “Studi Pemantauan Kampanye Digital para Kandidat dalam Pilkada 2020 Kabupaten Bantul di Tengah Pandemi Covid-19”, *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol. 4, No.1 (2021), h. 25.

¹¹¹ Fajar Mu'ti Abdillah, Abraham Zakky Zulhazmi, “Kampanye Digital, Politik Lokal, dan Media Sosial”, *Iqtida: Journal of Da'wah and Communication*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2021), h. 60.

melaui media digital merupakan sarana yang tidak bisa dihindarkan dalam rangka mensosialisasikan program kerja kepada masyarakat.¹¹²

Perkembangan media baru, seperti media sosial, telah mengubah aktivitas kampanye para politikus dalam era saat ini. Media sosial memberikan kemampuan untuk menciptakan ruang komunikasi antara politisi dan publik, serta menarik minat pemilih pemula atau pemilih muda, sehingga media sosial semakin penting bagi politisi. Pada masa lalu, kampanye politik terbatas pada metode konvensional, namun sekarang telah berubah menjadi kampanye digital. Media baru telah mempengaruhi fenomena politik tidak hanya pada tingkat nasional, tetapi juga pada tingkat politik lokal. Para politikus perlahan menyadari dan menggunakan media baru sebagai metode terkini untuk membentuk citra digital diri mereka, yang dianggap lebih efektif daripada metode konvensional yang umum digunakan pada era sebelumnya.¹¹³

4. Instagram

Instagram adalah sebuah aplikasi untuk berbagi foto yang dapat dilihat oleh followers dari pengunggah foto tersebut dan dapat saling memberikan komentar sesamanya. Nama Instagram sendiri berasal dari *insta* dan *gram*, “*insta*” yang berasal dari kata *instant* seperti kamera *polaroid* yang pada masanya lebih dikenal dengan sebuah foto *instan* dan “*gram*” yang berasal dari *telegram* yang cara kerjanya untuk mengirimkan informasi kepada orang lain secara cepat. Para pengguna *smartphone* sering menggunakan jaringan ini

¹¹² Muhammad Fikri dkk, “Pengelolaan Kampanye Digital”, h. 1236.

¹¹³ Fajar Mu’ti Abdillah, Abraham Zakky Zulhazmi, “Kampanye Digital, Politik Lokal, dan Media Sosial”, *Iqtida: Journal of Da’wah and Communication*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2021), h. 59.

untuk langsung membagikan foto mereka. Tidak jarang digunakan untuk penjualan online.¹¹⁴

Instagram telah menjadi salah satu media sosial yang efektif dalam melakukan pencitraan diri dalam kampanye digital. Instagram didirikan pada tahun 2010 oleh perusahaan Burbn.Inc, sebuah start-up yang berfokus pada pengembangan aplikasi *smartphone*. CEO Instagram sekarang adalah Adam Mosseri. Burbn. Inc, Kevin Systrom dan Mike Krieger, awalnya menciptakan versi pertama Burbn.Inc, tetapi memiliki banyak kekurangan. Akhirnya, Kevin Systrom dan Mike Krieger memutuskan untuk fokus pada fitur foto, yang pada akhirnya menjadi cikal bakal aplikasi media sosial Instagram. Perbedaan Instagram dengan Facebook adalah penggunaan sistem "mengikuti" atau "follow" daripada sistem "teman".¹¹⁵

Instagram bermula dari sekadar platform sederhana untuk berbagi foto secara “instan”, pelan tapi pasti Instagram terus dimodifikasi menjadi alat dan cara untuk mencapai berbagai tujuan, mulai dari berjejaring, cv dan portofolio daring, perangkat pemasaran, dan sekarang: alat politik. Suatu pergeseran dan dinamika yang mungkin tidak pernah terbayangkan oleh pembuatnya sekalipun ketika merilis aplikasi ini pertama kalinya. Internet sebagai motor penggerak era media sosial ini telah membuat pergeseran besar semacam itu menjadi hal yang tidak lagi mustahil untuk dicapai. Sejak diakuisisi Facebook—sekarang Meta—pada tahun 2012 lalu pengguna platform media sosial Instagram terus

¹¹⁴ Feri Sulianta, *Keajaiban Media Sosial* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), h. 119-120.

¹¹⁵ Fajar Mu'ti Abdillah, Abraham Zakky Zulhazmi, “Kampanye Digital, Politik Lokal, dan Media Sosial”, *Iqtida: Journal of Da'wah and Communication*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2021), h. 60.

meningkat drastis tiap tahunnya.¹¹⁶ Menurut data We Are Social, pengguna aktif bulanan (monthly active user/MAU) Instagram di seluruh dunia mencapai angka 1,4 miliar orang pada April 2022. Sedangkan Indonesia memiliki 99,9 juta pengguna aktif bulanan Instagram pada April 2022. Jumlah tersebut merupakan yang terbesar keempat di dunia dibawah India, Amerika Serikat, dan Brasil.¹¹⁷

Tidak seperti Facebook ataupun Twitter, Instagram cenderung berorientasi pada aspek visual sebagai tema besarnya dibandingkan kata-kata. Hal ini sejalan dengan temuan lain yang tidak kalah menarik yang didapatkan oleh Business Insider tahun 2019. Riset yang dilakukan terhadap 1.884 orang dengan rentang usia 13-21 tahun ini secara spesifik menunjukkan bahwa 59% responden mengakses berita politik melalui sosial media, dimana 65%-nya menempatkan Instagram sebagai sumber utama.¹¹⁸

¹¹⁶ Mohammad Ichlas El Qudsi dan Ilham Ayatullah Syamtar, “Instagram Dan Komunikasi Politik Generasi Z Dalam Pemilihan Presiden 2019 (Studi Pada Mahasiswa Universitas Pertamina)”, *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis*, Vol. 4, No. 2 (Desember 2020), h.170.

¹¹⁷ Monavia Ayu Rizaty, “Pengguna Instagram Indonesia Terbesar Keempat di Dunia”. <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-instagram-indonesia-terbesar-keempat-di-dunia>, diterbitkan pada 3 Agustus, diakses tanggal 6 November 2022.

¹¹⁸ Mohammad Ichlas El Qudsi dan Ilham Ayatullah Syamtar, “Instagram Dan Komunikasi Politik Generasi Z Dalam Pemilihan Presiden 2019 (Studi Pada Mahasiswa Universitas Pertamina)”, h.171.